

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar 3.
Letak Geografis Kabupaten Batu Bara



Sumber : <https://digilib.unimed.ac.id>

(Diakses pada pukul 20:00 wib 25 November 2025)

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatra Utara, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan, sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Kabupaten Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang

berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 904,96 km² atau 90.496 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan serta 151 desa/kelurahan definitif. Letak geografis Kabupaten Batu Bara berada di 2°03'00" Lintang Utara dan 99°01'00" Bujur Timur. Wilayahnya didominasi oleh daratan rendah dengan sebagian besar aktivitas masyarakat berada disektor pertanian, perikanan, dan industri. Posisi Geografis ini menjadikan Batu Bara sebagai salah satu lokasi strategis pengembangan Industri Nasional, terutama melalui pembangunan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung dan kawasan Industri terintegrasi di sekitarnya. Adapun batas administrasi Kabupaten Batu Bara yaitu :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Timur : Selat Malaka

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, Jawa dan Suku Batak, Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bennukim disini. Pada masa kolonial, untuk memperoleh prestise serta jabatan dari sultan-sultan Melayu, banyak di antara orang-orang Mandailing yang mengubah identitasnya dan memilih menjadi seorang Melayu. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Keturunan Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Gambar4.**Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran**

Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2014				
Kecamatan	Luas Wilayah	Rumah Tangga	Penduduk	Persebaran Penduduk
Sei Balai	92,64	6 604	27 609	7
Tanjung Tiram	173,79	14 571	66 749	17
Talawi	89,80	12 875	57 128	14
Lima Puluh	239,55	20 646	89 033	22
Air Putih	72,24	11 485	49 217	12
Sei Suka	171,47	13 023	55 045	14
Medang Deras	65,47	11 814	51 698	13
Batu Bara	904,96	91 018	396 479	100
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara				

Daya tarik wisata lain yang menonjol dan sangat layak untuk dikembangkan di Kabupaten Batu Bara adalah wisata kepulauan dan wisata pantai sepanjang pesisir timur kabupaten yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Lokasi penelitian yang telah dipilih oleh peneliti yaitu Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini juga melibatkan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara.

4.1.2 Sejarah Wisata Pulau Pandang

Gambar5.
Wisata Pulau Pandang Kabupaten Batu Bara



Sumber : *Disbudparekraf.sumut prov.go.id (Di akses pada pukul 22:00 wib pada tanggal 26 november 2025)*

Pulau Pandang adalah pulau kecil dengan luas ± 7 hektar yang berada di Selat Malaka, sekitar 51 kilometer dari daratan Tanjung Balai, dan secara administratif masuk ke wilayah Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Pulau ini dapat di akses dari Tanjung Tiram menggunakan kapal nelayan dengan waktu tempuh sekitar 2 jam jika cuaca bagus dan hampir 3 jam jika cuaca kurang baik.

Pulau ini memiliki karakter yang sangat menonjol dari sisi estetika dan ekosistem laut. Pasir putih yang bersih, air laut yang jernih, serta terumbu karang yang masih alami menjadikan kawasan ini surga bagi pecinta snorkeling dan diving. Objek menarik lainnya seperti batu spiritual (batuh belah) yang memiliki situs lagenda turun temurun oleh masyarakat Melayu Batu Bara sebuah batu besar yang menyerupai kepala buaya dan

diyakini bisa menelan manusia.,kemudian ada juga keberadaan penyu yang bertelur dan sumur air tawar di tengah pulau menjadikan Pulau Pandang unik dan memikat.

4.1.3 Lokasi Penelitian

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata berada di Jalan Besar Perupuk Dusun III, Kecamatan Limah Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara.

Lembaga ini beroperasi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pembinaan, pengoordinasian, serta pengawasan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata di Kabupaten Batu Bara.

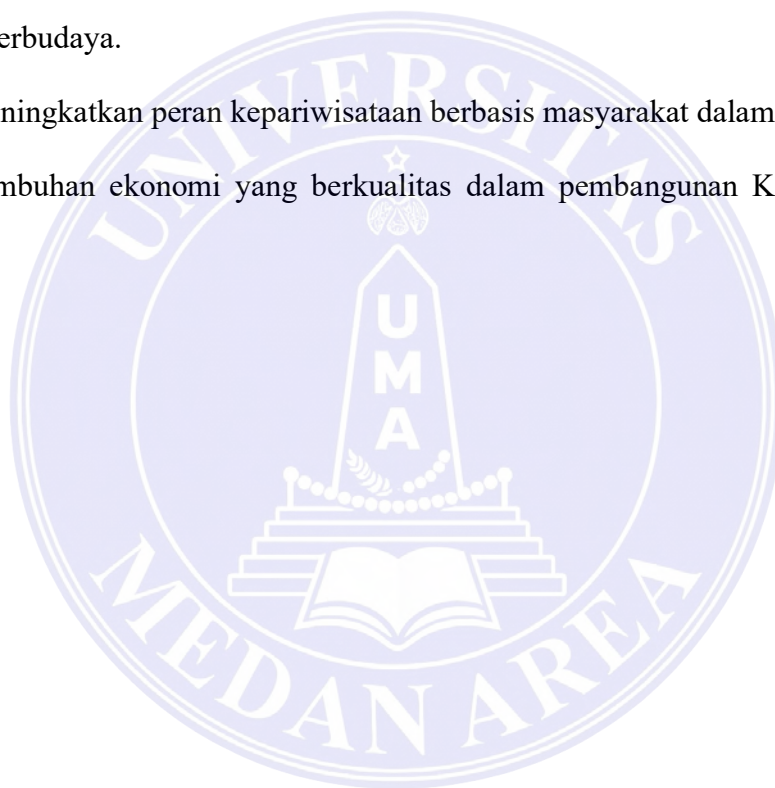
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai arah dan tujuan penyelenggaraan program kerja, guna mewujudkan pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun visi misi tersebut sebagai berikut :

1. Visi

Menjadikan masyarakat Batu Bara masyarakat yang gemar berolahraga dan mengembangkan destinasi pariwisata yang sejahterah dan berbudaya.

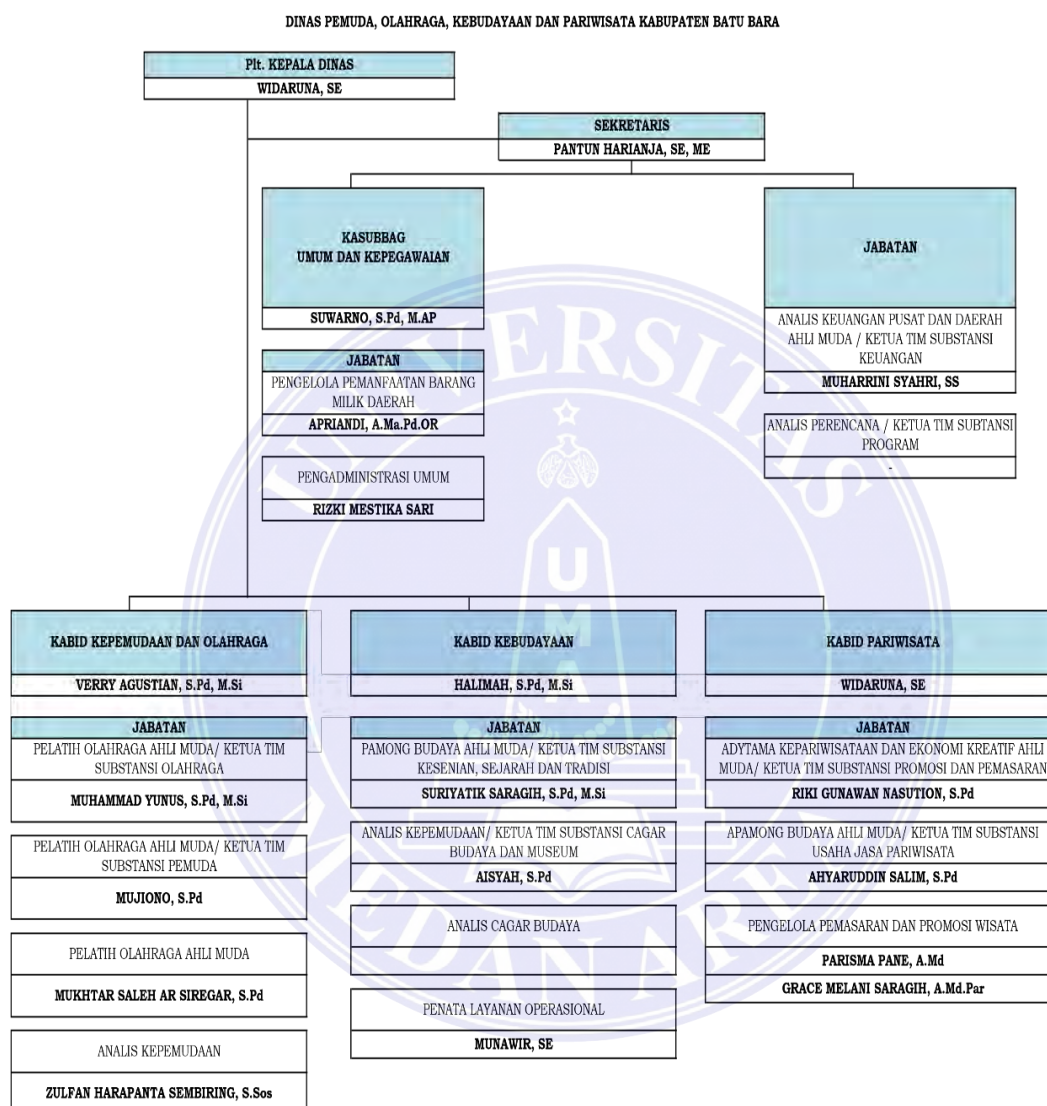
2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang produktif, inovatif dan berbudaya.
- b. Meningkatkan peran kepariwisataan berbasis masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.



4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar6.
Struktur Organisasi



*Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Batu Bara 2026.*

4.1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pariwisata

1. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan pemantauan sarana wisata, menyelenggarakan proses perizinan, perjalanan wisata dan tenaga kerja pariwisata.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
 - b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi petunjuk, arahan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
 - c. mengkoordinasikan para kepala seksi baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
 - d. mengkoordinir pelaksanaan tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan memproses perizinan serta pemantauan hotel, rumah makan dan restoran / bar, usaha jasa wisata lainnya dan pembinaan dan pemantauan tenaga kerja pariwisata.
 - e. menyeleksi pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi dilingkungan Bidang Pariwisata sesuai dengan rencana dan realisasinya.
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi dilingkungan

untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bidang Pariwisata supaya kegiatan sesuai dengan rencana.

h. meneliti dan menyeleksi konsep rencana kegiatan seksi pada Bidang Pariwisata agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

i. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Bidang Pariwisata berdasarkan hasil yang dicapai.

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Bidang Pariwisata untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya.

k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas masing masing.

Bidang Pariwisata terdiri dari:

1. Seksi Promosi dan Pemasaran.
2. Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata.

Seksi Promosi dan Pemasaran

1. Seksi Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang .

3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf pada Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan.
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
- e. mengumpulkan dan mengolah data sehubungan dengan atraksi dan pemasaran serta promosi pariwisata.
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan seksi promosi dan pemasaran pariwisata serta menyiapkan bahan pemecahannya.
- g. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi promosi dan pemasaran pariwisata berdasarkan hasil yang dicapai.
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas masing-masing. Pariwisata dibagian Promosi dan Pemasaran.

Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata

1. Seksi Usaha dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan

dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pembinaan dan pemantauan jasa pariwisata.

3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan praturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.
- c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf pada Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan.
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata.
- e. mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan jasa perjalanan dan jasa pemandu wisata.
- f. menginventarisir biro perjalanan dan pemandu wisata yang ada di Daerah.
- g. mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan biro perjalanan dan pemandu wisata.
- h. memonitoring dan evaluasi kegiatan operasional usaha perjalanan dan pemandu wisata yang ada.
- i. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata serta menyiapkan bahan pemecahannya.
- j. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata

berdasarkan hasil yang dicapai.

k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas masing masing.

4.1.6 Kantor Camat Tanjung Tiram

Kantor Camat Tanjung Tiram adalah bagian dari perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan tugas menjalankan sebagian kewenangan pemerintah daerah serta menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan :

1. Visi

menjadikan masyarakat Tanjung Tiram yang “TERDEPAN” (tertib,damai, elok dan menjadi panutan) memiliki Sdm yang tangguh untuk mencapai masyarakat Batu Bara sejahtera berjaya yang gemilang,

2. Misi

a. Meningkatkan pelayanan masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram atas pelayanan publik.

b. Menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah desa untuk menjalankan tertib administrasi.

c. Melayani dan mengarahkan masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif, kreatif, dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan

4.1.7 Struktur Organisasi Camat Tanjung Tiram

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 33 Tahun 2014 Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara, Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Gambar7.
Struktur Organisasi Kantor Camat Tanjung Tiram



Sumber : Struktur organisasi Camat Tanjung Tiram
(Diambil pada tanggal 06 januari 2026).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Dalam Pengembangan Wisata Pulau Pandang

Dinas Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal dengan mengembangkan strategi pemasaran, promosi destinasi dan pembangunan infrastruktur pariwisata melalui kampanye yang efektif, dinas pariwisata dapat mengangkat potensi dan keunikan setiap destinasi serta menarik perhatian wisatawan lokal. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang otentik. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang terencana dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan juga membuat destinasi menjadi lebih menarik dan berkelanjutan. Dalam perannya ini, dinas pariwisata menjadi penggerak utama peningkatan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata.

Dinas pariwisata memegang peran krusial dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal melalui berbagai strategi dan inisiatif. Pertama-tama, mereka merancang kampanye pemasaran yang efektif untuk mempromosikan potensi wisata setempat. Hal ini mencakup penggunaan media sosial seperti melalui instagram, tiktok, facebook, twitter, dan memiliki website sendiri. Promosi non digital yang dilakukan melalui event, roadshow perjalanan keluar daerah lalu mempresentasikan daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Batu Bara, sambil mengundang guru dan kepala sekolah, lalu ada funtrip (memanggil blogger dan konten creator untuk membuat vlog dan menulis artikel) , dan travelmart (jual beli wisata) , Dinas Pariwisata juga memiliki Aplikasi dan situs web resmi tersendiri dan serta kampanye iklan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Selain itu, dinas pariwisata dapat bekerja sama dengan pelaku lokal, termasuk pengusaha hotel, restoran, dan usaha kecil lainnya, untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga memberikan dorongan ekonomi kepada masyarakat setempat. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang baik juga menjadi fokus. Dinas pariwisata dapat mengadvokasi investasi dalam fasilitas seperti jalan, transportasi, dan area parkir untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata. Tidak lupa pula Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara ini juga mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kebersihan, keramahan, dan pelestarian budaya dapat dikelola oleh dinas pariwisata. Ini membantu menciptakan lingkungan yang ramah wisatawan dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan upaya ini, dinas pariwisata dapat menjadi pionir dalam mengangkat daya tarik wisata lokal, menciptakan dampak positif bagi ekonomi dan budaya komunitas setempat.

Dalam hal ini peran dinas pariwisata bukan hanya memberikan saran, tetapi juga membimbing dan mendukung implementasi perubahan positif. Ini mencakup memberikan panduan mengenai praktik terbaik, menyusun strategi pemasaran, dan memberikan dukungan teknis bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tempat wisata. Dengan pendekatan ini, dinas pariwisata dapat memastikan bahwa tempat wisata berkembang secara berkelanjutan sambil memberikan manfaat nyata kepada masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi maupun peningkatan keterampilan. Untuk melihat bagaimana peran dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kabupaten batu bara, penulis melakukan penelitian atau riset pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sejalan dengan teori peran yang diambil yaitu teori peran

menurut Blakely, dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) yaitu sebagai : Koordinator, Fasilitator, Stimulator, Motivator.

1. Peran Sebagai Koordinator

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara menjalankan peran sebagai koordinator dengan mengintegrasikan kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pengelola objek wisata, masyarakat setempat, serta sektor swasta. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam mendukung pengembangan destinasi wisata.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Widaruna S.E selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan pertanyaan bagaimana peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta untuk meningkatkan potensi Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Beliau mengatakan :

“ Bahwa kami Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara sudah mengoordinasi dan mengintegrasikan program-program wisata dengan Pemkab dan masyarakat Kami Dinas juga melibatkan Karang Taruna dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Wisata Pulau Pandang, Kerja sama turut dijalin dengan pihak swasta seperti Travel dan pelaku usaha pariwisata guna mendukung wisata Pulau Pandang agar menjadi destinasi yang diminatin oleh wisatawan”

(Wawancara pada pukul 10:30 wib pada hari Selasa, 07 Januari 2026).

Dalam wawancara ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah menjalankan fungsi koordinatif melalui beberapa langkah strategis :

Pertama, integrasi program dengan Pemerintah Kabupaten menunjukkan adanya upaya penyesuaian kebijakan agar pengembangan Wisata Pulau Pandang menjadi bagian

dari agenda pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan arah pembangunan wisata berjalan sesuai dengan perencanaan daerah.

Kedua, pelibatan masyarakat melalui Karang Taruna mencerminkan adanya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan wisata. Langkah ini menunjukkan bahwa Dinas tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat lokal. Dengan demikian, koordinasi yang dibangun tidak bersifat satu arah, melainkan melibatkan aktor lokal dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata.

Ketiga, kerja sama dengan pihak swasta seperti travel dan pelaku usaha pariwisata menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam mendukung promosi dan pengembangan destinasi. Kemitraan ini berperan penting dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya tarik Pulau Pandang sebagai destinasi wisata. Dalam konteks teori peran, langkah ini mencerminkan kemampuan Dinas dalam mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata.

Kemudian Bapak Widaruna S.E selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata juga menegaskan :

“Koordinasi antar pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Melalui koordinasi yang terintegrasi, dalam hal ini Dinas sudah berupaya memperkuat sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Batu Bara”

(Wawancara pada pukul 10:30 wib pada hari Selasa, 07 Januari 2026).

Gambar 8.
Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Batu Bara



Sumber : Di ambil oleh peneliti

Melalui hasil wawancara, tujuan koordinasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas, yaitu agar setiap pihak menjalankan tugas sesuai kewenangan dan mewujudkan pengembangan yang terencana serta berkelanjutan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang terstruktur. Koordinasi yang terintegrasi diharapkan memperkuat sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Batu Bara.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos.,MAP selaku kepala camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara :

“Beliau mengungkapkan bahwa Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara telah berperan dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang, namun implementasinya dinilai belum berjalan secara maksimal. Menurut beliau, koordinasi antara Dinas dengan pemerintah kecamatan dan desa masih perlu diperkuat, khususnya dalam melibatkan pihak kecamatan pada tahap perencanaan program serta proses pengambilan kebijakan. beliau menyampaikan bahwa beberapa program pengembangan pariwisata masih dilaksanakan secara terpusat, sehingga belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dan pemuda dalam pengelolaan wisata dinilai belum merata dan masih memerlukan pendampingan yang lebih berkelanjutan

agar potensi Wisata Pulau Pandang dapat dikembangkan secara lebih optimal.”
(Wawancara pada pukul 14:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Gambar9.
Wawancara dengan Kepala Camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara



Sumber : *Diambil oleh peneliti*

Berdasarkan hasil wawancara pihak camat, menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengintegrasikan program secara struktural, tetapi juga memastikan pelibatan aktif pemangku kepentingan lokal pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Kurangnya keterlibatan kecamatan dalam perencanaan menunjukkan koordinasi yang masih bersifat top-down.

Selain itu, pelaksanaan program yang terpusat mengindikasikan bahwa pendekatan pengembangan pariwisata belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal (bottom-up planning). Padahal pengembangan destinasi wisata yang efektif memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan riil masyarakat dapat menghambat optimalisasi potensi Wisata Pulau Pandang.

Partisipasi masyarakat dan pemuda yang belum merata menunjukkan bahwa peran Dinas dalam membangun pemberdayaan dan pendampingan masih perlu

ditingkatkan. Dari sudut pandang pembangunan pariwisata berkelanjutan, keterlibatan warga lokal adalah elemen kunci karena mereka merupakan pelaku utama serta penerima manfaat langsung aktivitas wisata.

Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam mendukung pengembangan Wisata Pulau Pandang telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Kelemahan utama terletak pada aspek koordinasi partisipatif, pelibatan kecamatan dalam perencanaan, serta pemerataan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu adrian selaku pelaku usaha travel wisata Pulau Pandang :

“Beliau mengungkapkan bahwa peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam menjalin koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata masih dinilai terbatas. Menurut beliau, Dinas cenderung memberikan dukungan dalam bentuk support terhadap aktivitas usaha pariwisata, namun belum terlibat secara aktif dalam proses koordinasi maupun perencanaan program bersama pelaku usaha. beliau menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan oleh Dinas umumnya bersifat administratif dan fasilitatif, seperti pemberian perizinan serta dukungan dalam kegiatan promosi. Namun demikian, belum terdapat pola koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara Dinas dan pelaku usaha travel. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Dinas sebagai koordinator dengan pelaku usaha pariwisata belum terlaksana secara sistematis, sehingga sinergi dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang masih perlu ditingkatkan.”

(wawancara pada pukul 16:00 pada hari Senin 06 Januari 2026).

Gambar10.
Wawancara dengan Pelaku Usaha Travel



Sumber : *Diambil oleh peneliti*

Berdasarkan hasil wawancara ini pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga membangun komunikasi berkelanjutan dengan pelaku usaha untuk menyusun perencanaan bersama, menetapkan strategi promosi, serta mengevaluasi program pengembangan wisata. Keterbatasan koordinasi yang berlangsung secara berkelanjutan menunjukkan hubungan antara Dinas dan pelaku usaha belum sepenuhnya terstruktur dalam mekanisme kemitraan yang sistematis. Padahal pelaku usaha travel memiliki peran krusial dalam menarik wisatawan dan memasarkan potensi Wisata Pulau Pandang.

Tanpa koordinasi yang aktif dan terencana, sinergi pengembangan destinasi wisata tidak optimal. Selain itu, dukungan administratif seperti perizinan dan promosi memang bagian dari fungsi pemerintah, namun pembangunan pariwisata berkelanjutan menuntut pola kerja yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Dinas perlu menginisiasi forum komunikasi rutin, perencanaan bersama, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan pelaku usaha.

Menurut perspektif pelaku usaha, peran Dinas dalam mendukung pengembangan Wisata Pulau Pandang telah berjalan tetapi belum optimal dalam koordinasi strategis dan berkelanjutan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis agar tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing serta keberlanjutan destinasi.

Kemudian wawancara dengan Abang wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara :

“Menurut wisatawan, hingga saat ini belum tampak adanya upaya koordinatif yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangan Wisata Pulau Pandang. Wisatawan menilai bahwa Wisata Pulau Pandang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Batu Bara. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya fasilitas pendukung, kurangnya kegiatan promosi, serta belum terintegrasinya pengelolaan destinasi wisata secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa keterlibatan pemerintah daerah, khususnya Dinas terkait, dalam mengoordinasikan pengembangan pariwisata belum berjalan secara maksimal.”

(Wawancara pada pukul 11:00 Wib pada hari Sabtu 24 Januari 2026).

Gambar11.
Wawancara dengan Wisatawan Pulau Pandang



Sumber : *Diambil oleh peneliti*

Melalui wawancara ini pandangan wisatawan mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan koordinatif yang diusulkan Dinas dan kenyataan di

lapangan, pemerintah daerah sebaiknya mengintegrasikan seluruh unsur pengelolaan destinasi, mulai dari fasilitas hingga promosi dan sistem pengelolaan yang terpadu. Ketika wisatawan merasakan fasilitas terbatas dan promosi yang kurang, ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya efektif. Ketidakberhasilan integrasi pengelolaan destinasi secara menyeluruh menandakan koordinasi belum berjalan secara sistematis. Pengembangan pariwisata yang efektif menuntut adanya keterpaduan antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan pengelola lapangan. Jika koordinasi tidak tercermin pada fasilitas dan promosi, wisatawan sebagai pengguna layanan akan merasakan dampaknya.

Pandangan ini juga memperkuat temuan bahwa koordinasi perlu ditingkatkan, baik dalam perencanaan, pelibatan pemangku kepentingan, maupun pelaksanaan program berkelanjutan. Secara konseptual Dinas telah menjalankan perannya, tetapi secara implementasi belum sepenuhnya tercermin dalam kualitas pengelolaan destinasi di lapangan. Berdasarkan perspektif wisatawan, peran Dinas dalam mendukung Wisata Pulau Pandang masih belum optimal, khususnya dalam mewujudkan koordinasi yang berdampak pada fasilitas, promosi, dan integrasi pengelolaan destinasi, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih terstruktur agar potensi Pulau Pandang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

2. Peran Sebagai *Fasilitator*

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya Dinas dalam menjembatani kebutuhan pengembangan wisata dengan pihak-pihak terkait.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Bapak Widaruna S.E selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan pertanyaan apa saja bentuk dan dukungan yang diberikan dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata baik berupa fasilitas, promosi, maupun reglasi untuk pengembangan wisata Pulau Pandang, beliau menjawab :

“Kami Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan pariwisata telah berupaya melaksanakan peran fasilitasi dengan menjembatani komunikasi dengan pihak investor, mengajukan surat kepada instansi terkait seperti PLN untuk pemasangan listrik tenaga surya, serta mengusulkan pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan sumur bor. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan persyaratan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.

beliau juga menyampaikan bahwa dalam aspek promosi, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain influencer dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain itu, setiap pelaksanaan pameran atau expo, baik di dalam maupun di luar daerah, Dinas secara aktif mempromosikan Wisata Pulau Pandang sebagai salah satu destinasi unggulan yang memiliki daya tarik dan potensi yang tidak kalah dengan objek wisata lainnya.

dari sisi penyediaan fasilitas pendukung, khususnya sarana transportasi penyeberangan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum menyediakan kapal penyeberangan resmi. Kebutuhan transportasi laut menuju Pulau Pandang masih mengandalkan kapal milik nelayan setempat. Dalam hal ini, pelaku usaha travel menjalin kerja sama dengan para nelayan untuk menyediakan layanan penyeberangan bagi wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas transportasi wisata masih memerlukan perhatian dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah.”

(wawancara pada pukul 10:30 pada hari Selasa 07 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini bentuk dukungan tersebut menunjukkan bahwa Dinas telah berupaya memfasilitasi kebutuhan dasar destinasi wisata, terutama di bidang infrastruktur dan utilitas. Usulan pemasangan listrik tenaga surya serta penyediaan sumur bor mencerminkan kesadaran bahwa keberlanjutan destinasi sangat bergantung pada tersedianya fasilitas dasar. Dalam kerangka teori fasilitator, langkah ini termasuk upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pariwisata.

Di ranah promosi, Dinas juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti

influencer dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain itu, setiap pameran atau expo, baik di dalam maupun luar daerah, menempatkan Wisata Pulau Pandang sebagai destinasi unggulan Kabupaten Batu Bara. Upaya promosi ini menunjukkan bahwa Dinas tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga memperluas akses informasi dan pemasaran destinasi. Secara teori, promosi adalah bagian dari fungsi fasilitasi karena pemerintah membantu membuka peluang pasar bagi pelaku usaha dan komunitas lokal.

Namun, terkait penyediaan fasilitas transportasi penyeberangan, masih ada keterbatasan. Sampai saat ini, Kabupaten Batu Bara belum menyediakan kapal penyeberangan resmi menuju Pulau Pandang; transportasi laut masih bergantung pada kapal milik nelayan setempat dengan kemitraan yang dibangun oleh pelaku usaha travel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dukungan fasilitatif pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan utama destinasi, terutama aksesibilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Dinas sebagai fasilitator telah berjalan tetapi belum optimal. Ada langkah nyata dalam penyediaan infrastruktur dasar dan promosi, namun ketiadaan fasilitas transportasi resmi menunjukkan keterbatasan dalam menyokong sarana pendukung utama. Padahal dalam teori pengembangan pariwisata, aksesibilitas adalah faktor kunci yang mempengaruhi minat kunjungan.

Bentuk dukungan Dinas meliputi:

1. fasilitasi infrastruktur dasar seperti listrik dan air,
2. promosi melalui kerja sama dengan influencer, Kominfo, dan expo, serta
3. dukungan administratif dan koordinatif dengan pihak terkait.

Meski demikian, peran fasilitator tersebut perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan fasilitas transportasi dan penguatan sarana pendukung lain agar

pengembangan Wisata Pulau Pandang berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar12.

Kapal milik nelayan setempat untuk penyenbrangan ke pulau pandang



Sumber : *(diambil oleh peneliti pada pukul 11:00 Wib pada hari Sabtu 24 Januari 2026)*

Kemudian dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos.,MAP selaku kepala camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara :

“Kalau dari kami pihak pemerintah kecamatan, dukungan yang diberikan dalam upaya menjaga keberlangsungan Wisata Pulau Pandang lebih difokuskan pada aspek keamanan dan ketertiban. Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram berperan dalam memfasilitasi pengawasan di sekitar area pelabuhan guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen kecamatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi aktivitas wisata, meskipun keterlibatan dalam aspek promosi dan pengembangan wisata masih relatif terbatas.”

(Wawancara pada pukul 14:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini dukungan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim kondusif bagi aktivitas pariwisata. Dalam kerangka teori fasilitator, pemerintah berperan menyediakan lingkungan yang mendukung melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan ketertiban.

Keamanan destinasi wisata menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan.

Pengawasan terhadap praktik pungutan liar menunjukkan upaya pencegahan guna menjaga citra dan kualitas layanan destinasi. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola pariwisata yang baik, di mana pemerintah menjamin kepastian dan ketertiban dalam aktivitas wisata. Dengan demikian, meskipun tidak langsung terkait pembangunan fisik atau promosi, langkah ini tetap bentuk fasilitasi untuk kelangsungan pengembangan wisata.

Namun demikian, keterlibatan kecamatan yang masih terbatas pada aspek keamanan menunjukkan bahwa fungsi fasilitator belum dijalankan secara menyeluruh pada semua indikator, seperti promosi, pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan program wisata berbasis lokal. Artinya, dukungan yang diberikan masih bersifat menjaga stabilitas, belum sepenuhnya mendorong inovasi dan pengembangan destinasi secara aktif.

Peran fasilitator pemerintah kecamatan dalam mendukung Wisata Pulau Pandang telah terlihat melalui pengawasan dan penegakan ketertiban. Agar pengembangan pariwisata lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan perluasan peran fasilitatif yang tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga pada promosi, pemberdayaan, dan pengembangan potensi lokal secara lebih komprehensif.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu adrian selaku pelaku usaha travel wisata Pulau Pandang :

“Beliau berkata bahwa peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara, terhadap aktivitas usaha yang mereka jalankan masih sebatas pemberian dukungan secara umum. Menurut pihak travel, Dinas belum terlibat secara langsung dalam pengelolaan maupun pengembangan operasional

wisata, melainkan hanya memberikan support dalam bentuk dukungan moral, perizinan, serta respons positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.”

(Wawancara pada pukul 16:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini dukungan berupa pemberian perizinan dan respons administratif merupakan bagian dari fungsi regulatif pemerintah daerah. Penyederhanaan izin usaha dan pemberian izin menjadi bentuk fasilitasi yang penting karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya. Dukungan moral serta respons positif juga mencerminkan adanya pengakuan pemerintah terhadap kontribusi pelaku usaha dalam mengembangkan destinasi wisata.

Peran pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada dukungan administratif dan moral, melainkan juga mencakup pendampingan teknis, pembinaan usaha, penguatan kapasitas, serta keterlibatan dalam penyusunan strategi pengembangan destinasi secara bersama. Ketidakikutsertaan langsung dalam pengelolaan maupun operasional menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi belum berjalan secara komprehensif dan sistematis.

Kondisi ini mengindikasikan hubungan antara Dinas dan pelaku usaha masih pasif dan reaktif, bukan kolaboratif dan proaktif. Padahal sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas promosi, serta menciptakan inovasi destinasi. Tanpa keterlibatan yang lebih intensif, potensi Wisata Pulau Pandang berisiko tidak berkembang optimal.

Bentuk dukungan yang diberikan Dinas meliputi aspek regulasi (perizinan), dukungan moral, dan respons administratif terhadap kegiatan usaha. Namun, menurut perspektif pelaku usaha, peran fasilitator tersebut masih terbatas dan belum menyentuh pengembangan operasional dan kemitraan strategis secara berkelanjutan. Diperlukan penguatan peran fasilitatif yang lebih aktif dan terstruktur agar pengembangan Wisata

Pulau Pandang lebih efektif, kolaboratif, dan berdaya saing.

Selanjutnya wawancara dengan Abang wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara :

“Kalau dari pendapat saya bahwa fasilitas pendukung wisata dinilai masih belum memadai. kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya menunjang kenyamanan pengunjung selama berada di lokasi wisata. Selain itu, wisatawan juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai Wisata Pulau Pandang yang mereka ketahui sebagian besar diperoleh melalui pihak travel.”

(Wawancara pada pukul 11:00 Wib pada hari Sabtu 24 Januari 2026).

Bedasarkan penjelasan di atas menunjukkan penyediaan sarana dan prasarana merupakan indikator utama dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Pemerintah daerah seharusnya memastikan ketersediaan fasilitas dasar yang memadai, seperti aksesibilitas, kebersihan, kenyamanan, serta fasilitas umum lain. Ketika wisatawan masih merasakan keterbatasan fasilitas, ini menandakan bahwa fungsi fasilitatif belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan lingkungan wisata yang nyaman dan kompetitif.

Selain itu, informasi yang lebih banyak diperoleh melalui pihak travel menunjukkan bahwa fungsi promosi Dinas belum sepenuhnya menjangkau wisatawan secara langsung. promosi adalah bentuk dukungan nonfisik yang penting untuk memperkenalkan dan meningkatkan daya tarik destinasi. Jika peran promosi pemerintah belum dirasakan secara luas, potensi wisata belum tersosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat luas.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara upaya fasilitasi yang direncanakan pemerintah dan realitas yang dirasakan wisatawan. Meski ada dukungan regulasi dan promosi melalui pameran atau kerja sama tertentu, dampaknya belum sepenuhnya terlihat pada peningkatan kualitas fasilitas dan penyebaran informasi yang

efektif.

Bahwa peran Dinas sebagai fasilitator telah berjalan namun belum optimal dalam hal penyediaan fasilitas dan promosi yang langsung dirasakan wisatawan. Diperlukan peningkatan kualitas sarana prasarana serta strategi promosi yang lebih luas dan terintegrasi agar pengembangan pariwisata lokal menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Peran Sebagai *Stimulator*

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara telah berupaya menjalankan perannya sebagai stimulator dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang. Peran stimulator dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam mendorong, menggerakkan, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya agar terlibat aktif dalam pengembangan sektor pariwisata.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Widaruna S.E selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan pertanyaan strategi dan program yang telah dilakukan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mendukung pengembangan wisata Pulau Pandang. Beliau mengatakan :

“Kami dinas menjalankan fungsi pendorong dengan memfasilitasi terbangunnya kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat setempat. Peran tersebut tercermin dari upaya Dinas dalam mendorong pelaku usaha travel untuk mengembangkan paket wisata Pulau Pandang serta menginisiasi kolaborasi dengan nelayan lokal dalam penyediaan layanan transportasi penyeberangan. Melalui pendekatan ini, Dinas berupaya menumbuhkan partisipasi dan inisiatif pelaku usaha serta masyarakat lokal agar terlibat aktif dalam mendukung pengembangan kegiatan pariwisata.”

(wawancara pada pukul 10:30 wib pada hari Selasa 07 Januari 2026).

Pernyataan wawancara tersebut Dinas tidak hanya berperan sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal. Dorongan kepada pelaku usaha travel untuk mengembangkan paket wisata merupakan bentuk stimulasi yang meningkatkan nilai jual destinasi. Dengan paket wisata yang terstruktur, Pulau

Pandang memiliki peluang menarik minat wisatawan secara lebih luas.

Selain itu, inisiasi kolaborasi dengan nelayan lokal dalam penyediaan transportasi penyeberangan menandakan upaya mengintegrasikan sektor pariwisata dengan ekonomi masyarakat pesisir. Strategi ini tidak hanya memperluas aksesibilitas wisata, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi nelayan setempat. Dalam kerangka teori stimulator, langkah ini merupakan dorongan ekonomi untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitar destinasi.

Dinas mencerminkan upaya membangun partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Dengan melibatkan pelaku usaha dan nelayan lokal, Dinas berupaya menumbuhkan sense of ownership terhadap pengembangan wisata Pulau Pandang. Partisipasi yang tumbuh dari inisiatif bersama menjadi indikator keberhasilan peran pemerintah sebagai stimulator.

Namun demikian, efektivitas peran stimulator tetap bergantung pada keberlanjutan program dan konsistensi pembinaan. Dorongan perlu diiringi pendampingan dan evaluasi agar kolaborasi yang ada dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara telah menjalankan peran sebagai stimulator melalui strategi mendorong paket wisata, membangun kolaborasi antara pelaku usaha dan nelayan lokal, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat. Peran ini menunjukkan upaya menggerakkan potensi ekonomi lokal, meskipun perlu penguatan agar dampaknya lebih optimal bagi pengembangan Wisata Pulau Pandang secara berkelanjutan.

Kemudian dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos.,MAP selaku kepala camat

Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara :

“Camat menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara untuk melibatkan pemerintah kecamatan secara aktif, baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata Pulau Pandang.”

(wawancara pada pukul 14:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini pemerintah sebagai stimulator seharusnya mampu mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan tingkat kecamatan, sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat lokal. Ketidakterlibatan kecamatan dalam tahap perencanaan mengindikasikan bahwa strategi pengembangan belum sepenuhnya berbasis kolaborasi dan partisipasi.

Peran stimulator menuntut adanya inisiatif untuk membangun sinergi lintas pemerintahan guna meningkatkan efektivitas program. Jika kecamatan tidak dilibatkan secara aktif, potensi dukungan lokal yang dapat mempercepat pengembangan wisata menjadi kurang optimal, dan integrasi antara program dinas dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan menjadi kurang kuat.

Dari perspektif pemerintah kecamatan, peran Dinas sebagai stimulator belum sepenuhnya terlaksana secara komprehensif. Meski ada program atau strategi yang dirancang, pelibatan aktif pemerintah kecamatan sebagai mitra strategis belum terlihat. Diperlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas tingkat agar fungsi stimulator lebih efektif dan mampu mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengembangan pariwisata lokal.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu adrian selaku pelaku usaha travel wisata Pulau Pandang :

“ Pandangan Bapak Bayu , peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara sebagai stimulator dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang dinilai masih belum berjalan secara optimal. Bapak Bayu menilai bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dengan Dinas Pariwisata dalam mendorong pengembangan pariwisata masih perlu ditingkatkan agar lebih terarah dan berkelanjutan. Meskipun demikian, Bapak Bayu juga mengakui bahwa Dinas telah menunjukkan upaya sebagai pendorong dengan melibatkan Karang Taruna dalam beberapa kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan Wisata Pulau Pandang. Keterlibatan organisasi kepemudaan tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk dukungan Dinas dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal.”

(wawancara pada pukul 16:00 wib pada hari Senin 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini peran stimulator telah dijalankan meskipun masih bersifat parsial. Pelibatan Karang Taruna mencerminkan upaya mendorong partisipasi sosial serta membangun kesadaran kolektif dalam mengembangkan destinasi. Dalam kerangka teori stimulator, langkah ini adalah bentuk stimulasi sosial yang bertujuan menciptakan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pariwisata.

Kurangnya kerja sama yang terarah dan berkelanjutan menunjukkan bahwa fungsi pendorong belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk strategi terpadu antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peran stimulator seharusnya tidak hanya memunculkan partisipasi awal, melainkan juga membangun sistem kolaborasi yang konsisten, terencana, dan memiliki arah pengembangan yang jelas.

Dari perspektif pelaku usaha, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan upaya sebagai stimulator melalui pelibatan Karang Taruna dan dukungan terhadap pengembangan kegiatan wisata. Namun peran tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar pengembangan Wisata Pulau Pandang dapat berjalan lebih optimal dan berdaya saing.

Selanjutnya wawancara dengan Abang wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara :

“Menurut saya keterlibatan pemerintah daerah dalam memajukan dan memperkenalkan Pulau Pandang sebagai destinasi wisata masih relatif terbatas. Sebagian besar juga mengungkapkan bahwa mereka mengetahui keberadaan Wisata Pulau Pandang melalui pihak travel atau informasi dari orang lain, bukan dari promosi yang dilakukan oleh pemerintah.”

(Wawancara pada pukul 11:00 Wib pada hari Sabtu 24 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini fungsi Dinas sebagai stimulator dalam bidang promosi dan perluasan informasi belum sepenuhnya efektif. Dalam kerangka teori, peran stimulator memerlukan strategi yang mampu meningkatkan eksposur destinasi secara luas melalui media, kegiatan promosi, maupun kampanye pariwisata yang terencana. Ketika informasi lebih banyak diperoleh dari pelaku usaha travel dibandingkan pemerintah, hal ini menandakan peran pendorong pemerintah belum dominan dalam membangun citra destinasi.

Persepsi wisatawan mengenai keterlibatan pemerintah yang masih terbatas menunjukkan bahwa strategi dan program yang dijalankan belum memberi dampak signifikan terhadap peningkatan visibilitas Pulau Pandang. Padahal, promosi yang kuat adalah instrumen utama untuk mendorong kunjungan dan meningkatkan daya saing destinasi.

Perspektif wisatawan, peran Dinas sebagai stimulator dalam mendukung pengembangan Wisata Pulau Pandang masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek promosi dan branding destinasi. Diperlukan strategi yang lebih terarah, inovatif, dan berkelanjutan agar keterlibatan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan pariwisata dirasakan secara nyata oleh wisatawan serta berdampak pada peningkatan kunjungan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Peran Sebagai *Motivator*

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara menekankan pentingnya langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penguatan peran masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan wisata.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Widaruna S.E selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan pertanyaan apa langkah strategis yang perlu dilakukan kedepan agar wisata pulau pandang dapat lebih dikenal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Beliau menjawab :

“Menurut kami, langkah yang perlu dilakukan ke depan agar Wisata Pulau Pandang semakin dikenal dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar adalah dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam mengelola potensi wisata yang ada kemudian penguatan promosi juga menjadi hal yang sangat penting, baik melalui pemanfaatan media digital, kerja sama dengan influencer, maupun keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pameran dan event pariwisata.”

(wawancara pada pukul 10:30 wib pada hari Selasa 07 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini strategi pembinaan dan pelatihan menunjukkan upaya Dinas dalam membangun kapasitas sumber daya manusia lokal. Dalam kerangka teori motivator, langkah ini adalah dorongan internal yang bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian masyarakat dalam mengelola destinasi wisata. Dengan pelatihan dan pendampingan, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek utama dalam pengembangan pariwisata.

Selanjutnya, penekanan pada penguatan promosi lewat media digital dan kerja sama dengan influencer mencerminkan upaya memotivasi pelaku usaha dan warga untuk lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dan tren pemasaran. Strategi ini menunjukkan adanya peran Dinas dalam memberi arah dan semangat inovasi agar pengembangan wisata tidak stagnan, melainkan mengikuti dinamika pasar.

Peran Dinas sebagai motivator tercermin melalui dorongan partisipasi aktif warga, peningkatan kapasitas sumber daya lokal, serta perluasan promosi destinasi melalui pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi. Langkah-langkah strategis ini mengindikasikan bahwa pengembangan Wisata Pulau Pandang ke depan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan SDM dan peningkatan kesadaran kolektif agar pariwisata memberi dampak ekonomi positif dan berkelanjutan bagi Kabupaten Batu Bara.

Kemudian dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos.,MAP selaku kepala camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara :

“Menurut kami dari pihak pemerintah kecamatan, yang perlu dilakukan ke depan agar Wisata Pulau Pandang semakin dikenal dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar adalah dengan memperkuat peran serta masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata. Masyarakat perlu didorong dan dimotivasi agar memiliki rasa memiliki terhadap objek wisata, sehingga turut menjaga, mengelola, dan mempromosikan Pulau Pandang secara berkelanjutan dan diperlukan peningkatan koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Dinas terkait, terutama dalam hal perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Penguatan aspek keamanan, ketertiban, serta kenyamanan pengunjung juga menjadi faktor penting agar wisatawan merasa aman dan tertarik untuk berkunjung kembali.”

(wawancara pada pukul 14:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini peran motivator tidak hanya sekadar memberikan arahan, melainkan juga membangun kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mencerminkan pendekatan pemberdayaan, di mana masyarakat diposisikan sebagai aktor utama dalam pengembangan wisata. Hal ini sejalan dengan teori motivator yang menekankan pentingnya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan destinasi.

Penekanan pada peningkatan koordinasi antara kecamatan, desa, dan Dinas

menunjukkan bahwa peran motivator membutuhkan dukungan sistem yang terintegrasi. Tanpa komunikasi dan kerja sama yang kuat, dorongan partisipatif kepada masyarakat tidak akan berjalan optimal. Dengan demikian, motivasi yang dibangun bersifat tidak hanya individual, tetapi juga struktural melalui penguatan kelembagaan.

Dari sudut pandang ini, bahwa langkah strategis yang diusulkan pemerintah kecamatan mempertegas pentingnya peran Dinas sebagai motivator dalam menciptakan pengembangan pariwisata yang berbasis partisipasi masyarakat, kolaborasi antarinstansi, serta jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Upayanya diharapkan meningkatkan citra Wisata Pulau Pandang sambil membawa dampak ekonomi dan sosial positif bagi masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu adrian selaku pelaku usaha travel wisata Pulau Pandang :

“Kalau dari saya yang perlu dilakukan ke depan agar Wisata Pulau Pandang semakin dikenal adalah dengan memperkuat promosi secara konsisten dan berkelanjutan, terutama melalui media digital dan jaringan kerja sama antar pelaku pariwisata. Pemerintah daerah dan Dinas terkait diharapkan dapat lebih aktif memotivasi dan melibatkan pelaku usaha travel dalam perencanaan serta pengembangan paket wisata yang menarik dan inovatif dan peningkatan kualitas fasilitas pendukung dan aksesibilitas menuju Pulau Pandang juga sangat diperlukan agar wisatawan merasa nyaman dan aman. Pelaku usaha travel juga perlu didorong untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat lokal, seperti nelayan dan pelaku UMKM, sehingga aktivitas pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat sekitar.”

(wawancara pada pukul 16:00 wib pada hari Senin 2026).

Berdasarkan hasil wawancara ini peran motivator Dinas belum optimal sepenuhnya, terutama karena tidak cukup hanya memberi dukungan normatif, melainkan juga perlu membangun sinergi, membuka ruang partisipasi, serta menciptakan iklim yang mendorong inovasi dan kolaborasi.

Penekanan pada promosi digital dan pengembangan paket wisata inovatif

mencerminkan kebutuhan akan arahan strategis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren pasar. Dorongan untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaku usaha travel dengan nelayan dan UMKM lokal menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas berperan sebagai penggerak yang menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengembangan wisata adalah hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Langkah strategis yang diharapkan pelaku usaha travel menegaskan pentingnya peran Dinas sebagai motivator yang proaktif, partisipatif, dan inovatif. Upaya penguatan promosi, peningkatan kualitas fasilitas, serta pelibatan pelaku usaha dan masyarakat lokal secara berkelanjutan akan kunci meningkatkan daya saing Wisata Pulau Pandang dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram dan Kabupaten Batu Bara secara umum.

Selanjutnya wawancara dengan Abang wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara :

“Kalau dari saya sebagai wisatawan, agar Wisata Pulau Pandang dapat lebih dikenal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, perlu adanya peningkatan promosi yang lebih luas dan menarik, terutama melalui media sosial dan platform digital. Informasi mengenai Pulau Pandang sebaiknya mudah diakses, jelas, dan menampilkan keunikan serta daya tarik yang dimiliki destinasi tersebut kemudian perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung wisata juga penting agar pengunjung merasa nyaman saat berkunjung. Masyarakat setempat juga perlu dilibatkan dan didorong untuk berperan aktif, misalnya dalam penyediaan jasa, penjualan produk lokal, atau pengelolaan kebersihan dan keamanan.”

(Wawancara pada pukul 11:00 Wib pada hari Sabtu 24 Januari 2026).

Pernyataan ini menegaskan bahwa peran motivator Dinas perlu diperkuat dalam dua bidang utama, yaitu promosi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan promosi digital mencerminkan kebutuhan akan dorongan inovatif agar destinasi memiliki daya

saing dan visibilitas yang lebih tinggi. Menurut teori motivator, langkah ini mewakili motivasi eksternal yang bertujuan menarik minat kunjungan sekaligus membentuk citra positif destinasi.

Sementara itu, dorongan agar masyarakat terlibat secara aktif menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan warga dalam penyediaan jasa, produk lokal, serta pengelolaan lingkungan adalah bentuk pemberdayaan yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap destinasi. Hal ini sejalan dengan gagasan *community-based tourism* sebagai strategi untuk menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.

Dari perspektif wisatawan, langkah ke depan perlu difokuskan pada penguatan promosi digital yang terintegrasi, peningkatan kualitas fasilitas, dan pemberdayaan masyarakat lokal secara aktif. Peran Dinas sebagai motivator menjadi kunci untuk membangun kesadaran bersama dan mendorong kolaborasi semua pemangku kepentingan agar Wisata Pulau Pandang dikenal luas sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial nyata bagi masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

4.2.2 Hambatan dan dukungan yang di hadapi dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan pariwisata pulau pandang, Kecamatan Tanjung Tiram.

Hambatan merupakan segala bentuk kendala, keterbatasan, atau faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, program, maupun kegiatan pengembangan pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pihak.

Seperti yang dikatakan Bapak Widaruna S.E selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang mengatakan :

“Hambatan utama dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang terletak pada aspek penganggaran. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur wisata

membutuhkan biaya yang cukup besar, dengan estimasi anggaran mencapai sekitar dua hingga tiga miliar rupiah. Namun, besarnya kebutuhan anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi hasil yang diperoleh. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan keterbatasan kemampuan daerah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pariwisata.

beliau juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Pulau Pandang belum dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Dinas dalam menarik retribusi, mengingat pembangunan awal Pulau Pandang bukan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata Pulau Pandang secara optimal.”

(Wawancara pada pukul 10:30 wib pada hari Selasa 07 Januari 2026).

Gambar13.
Bangunan yang tidak selesai di Pulau Pandang



Sumber : (di ambil oleh peneliti pada pukul 11 : 00 Wib
pada hari Sabtu 24 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara keterbatasan anggaran merupakan hambatan struktural yang berdampak langsung pada lambatnya pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata. Infrastruktur yang belum memadai berimplikasi pada rendahnya daya tarik dan kenyamanan destinasi, sehingga memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran Dinas dalam pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah serta kebijakan anggaran yang berlaku secara nasional.

Hambatan lain yang diungkapkan adalah belum adanya kontribusi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dari Wisata Pulau Pandang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Dinas dalam menarik retribusi, mengingat pembangunan awal Pulau Pandang bukan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara administratif dan regulatif, kondisi tersebut membatasi ruang gerak Dinas dalam mengelola potensi penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Akibatnya, tidak adanya pemasukan langsung dari destinasi wisata tersebut juga berdampak pada minimnya alokasi dana pengembangan lanjutan.

Di sisi lain terdapat dukungan berupa komitmen pemerintah daerah untuk tetap mengembangkan Pulau Pandang sebagai destinasi wisata unggulan. Dukungan tersebut tercermin dari adanya perencanaan pembangunan serta upaya koordinasi dengan berbagai pihak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan kewenangan.

Hambatan utama dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang bersifat finansial dan regulatif, yang berdampak pada belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dukungan yang ada masih berupa komitmen dan perencanaan kebijakan, namun memerlukan penguatan dari aspek anggaran, regulasi, dan kewenangan pengelolaan agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Kemudian dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos.,MAP selaku kepala camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara :

“Beliau menyampaikan bahwa ketika terdapat kunjungan wisatawan dari luar daerah, ketersediaan lahan parkir masih belum memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung serta menghambat kelancaran aktivitas wisata, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.”
(Wawancara pada pukul 14:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Gambar14.
Suasana sekitar pelabuhan Tanjung Tiram



Sumber : (di ambil oleh peneliti pada pukul 16:00 Wib
pada hari Senin 06 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara keterbatasan lahan parkir merupakan bagian dari persoalan infrastruktur pendukung yang langsung memengaruhi kualitas layanan pariwisata. Sarana parkir yang tidak memadai dapat menyebabkan kepadatan kendaraan, mengganggu ketertiban, serta menurunkan kenyamanan dan citra positif wisatawan terhadap destinasi. Dalam konteks pengembangan pariwisata, aspek aksesibilitas dan fasilitas pendukung menjadi indikator penting untuk meningkatkan daya saing destinasi.

Permasalahan ini juga menegaskan bahwa pengembangan wisata tidak hanya berfokus pada lokasi utama destinasi, melainkan juga pada kawasan penunjang seperti area pelabuhan dan titik keberangkatan penyeberangan. Hambatan yang terjadi di tingkat Kecamatan menjadi bagian dari tanggung jawab koordinatif antara Dinas dan pemerintah kecamatan dalam merumuskan solusi yang terintegrasi.

Adanya perhatian dan penyampaian permasalahan ini oleh pihak kecamatan menunjukkan adanya dukungan institusional dalam bentuk kesiapan untuk berkoordinasi dan memperbaiki pelayanan wisata. Hal ini dapat menjadi modal penting bagi Dinas

untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi hambatan infrastruktur secara bertahap.

Hambatan dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang tidak hanya terkait anggaran dan regulasi, tetapi juga keterbatasan fasilitas pendukung seperti lahan parkir yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Dinas dan pemerintah kecamatan guna memastikan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai sebagai bagian dari upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu adrian selaku pelaku usaha travel wisata Pulau Pandang :

“Beliau menyampaikan bahwa hingga saat ini sarana transportasi penyeberangan belum tersedia secara memadai dan masih mengandalkan kapal milik masyarakat setempat yang disewa untuk keperluan operasional wisata. Selain itu, aspek keamanan juga dinilai belum optimal, sehingga membutuhkan perhatian lebih lanjut. Bapak Bayu juga menambahkan bahwa pelaksanaan dan tindak lanjut program dari pihak terkait masih dirasakan kurang maksimal, khususnya dalam hal eksekusi kebijakan di lapangan.”

(Wawancara pada pukul 16:00 wib pada hari senin 06 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara keterbatasan sarana transportasi penyeberangan menjadi hambatan krusial bagi pengembangan destinasi berbasis kepulauan. Transportasi yang belum memadai bisa membatasi kunjungan, meningkatkan risiko keselamatan, dan mereduksi kepercayaan wisatawan. Ketergantungan pada kapal sewaan masyarakat mencerminkan partisipasi lokal sebagai dukungan, namun juga menandai belum adanya sistem transportasi wisata yang terstandarisasi dan berkelanjutan.

Aspek keamanan yang belum optimal turut menjadi hambatan non-fisik yang memengaruhi persepsi wisatawan terhadap destinasi. Jaminan keamanan adalah faktor utama untuk pengalaman wisata yang positif dan kunjungan ulang. Oleh karena itu,

standar keselamatan dan pengawasan operasional perlu menjadi fokus perhatian yang mendesak.

Selain itu, lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan menunjukkan kesenjangan antara perencanaan program dan implementasi. Dukungan kebijakan yang dirancang belum sepenuhnya diubah menjadi tindakan konkret yang berkelanjutan. Hambatan ini bersifat manajerial dan koordinatif, sehingga perlu penguatan pengawasan serta evaluasi berkala.

Meski demikian, keterlibatan masyarakat setempat dalam penyediaan kapal penyeberangan dapat dilihat sebagai bentuk dukungan sosial untuk pengembangan wisata. Partisipasi ini menunjukkan potensi kolaborasi yang bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pengelolaan yang lebih profesional dan terintegrasi.

Hambatan pengembangan Wisata Pulau Pandang dari sudut pandang pelaku usaha mencakup keterbatasan transportasi, keamanan yang belum optimal, serta implementasi program yang lemah. Dukungan yang ada berupa partisipasi warga dalam operasional penyeberangan perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih terstruktur agar pengembangan pariwisata di Kecamatan Tanjung Tiram dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Wawancara dengan Abang wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara :

“Saya menilai bahwa sarana dan prasarana pendukung wisata masih belum memadai, baik dari sisi fasilitas umum maupun penunjang aktivitas wisata di lokasi dan informasi petunjuk terkait destinasi wisata masih minim, sehingga menyulitkan kami pengunjung dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang tersedia di Wisata Pulau Pandang.”

(Wawancara pada pukul 11:00 Wib pada hari Sabtu 24 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara keterbatasan sarana dan prasarana menandakan

hambatan pada infrastruktur dasar serta fasilitas pendukung. Fasilitas umum seperti tempat istirahat, sanitasi, papan informasi, dan fasilitas keselamatan sangat penting untuk kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Ketidakmemadaan fasilitas ini berpotensi menurunkan kualitas pengalaman dan menurunkan peluang kunjungan kembali.

Minimnya informasi dan petunjuk destinasi mencerminkan kendala dalam manajemen informasi dan pelayanan publik. Dalam pengembangan pariwisata modern, ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses merupakan bagian kunci untuk meningkatkan daya saing destinasi. Kurangnya informasi tidak hanya menyulitkan wisatawan, tetapi juga bisa mempengaruhi persepsi terhadap profesionalitas pengelolaan wisata.

Namun, masukan dan evaluasi dari wisatawan dapat dipandang sebagai bentuk dukungan tidak langsung bagi pengembangan destinasi. Kritik dan saran menjadi bahan refleksi bagi Dinas untuk meningkatkan kualitas layanan. Respons terhadap kebutuhan wisatawan menjadi indikator penting dalam membentuk pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kepuasan pengunjung.

Hambatan pengembangan Wisata Pulau Pandang menurut perspektif wisatawan meliputi keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya informasi destinasi. Umpan balik pengunjung dapat menjadi dasar bagi Dinas untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan sarana/prasarana, serta sistem informasi wisata, agar pengembangan di Kecamatan Tanjung Tiram lebih optimal dan berkelanjutan.

Dukungan adalah segala bentuk faktor pendukung yang dapat memperlancar dan memperkuat upaya pengembangan pariwisata. Dukungan dapat berupa kebijakan pemerintah, kerja sama antar instansi, partisipasi masyarakat, keterlibatan pelaku usaha,

hingga potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki suatu daerah. Dukungan berperan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya program pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, hal ini bisa kita lihat dari berbagai pihak.

Seperti yang dikatakan Bapak Widaruna S.E selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang mengatakan :

“Dinas telah memberikan dukungan melalui berbagai upaya fasilitatif. Dukungan tersebut diwujudkan dengan menjalin komunikasi dan menghubungkan pihak investor, mengajukan permohonan kepada PLN untuk pemasangan listrik tenaga surya, serta menyurati Dinas Pekerjaan Umum terkait pembangunan infrastruktur dasar. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung wisata yang dibutuhkan oleh investor dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang.”

(Wawancara pada pukul 10:30 wib pada hari Selasa 07 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dukungan ini menunjukkan bahwa Dinas sudah berupaya menjalin komunikasi dengan investor menggambarkan strategi menarik partisipasi swasta dalam pengembangan destinasi. Hal ini sangat relevan mengingat keterbatasan anggaran daerah yang menjadi hambatan utama pembangunan infrastruktur wisata.

Pengajuan pemasangan listrik tenaga surya kepada PLN adalah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar destinasi, khususnya menjamin energi yang berkelanjutan bagi wilayah kepulauan. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait pembangunan infrastruktur dasar menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif antarinstansi dalam mendukung kelengkapan fasilitas wisata.

Dukungan Dinas masih bersifat koordinatif dan administratif membangun komunikasi, mengajukan permohonan, dan mendorong pemenuhan persyaratan teknis bagi investor. Meski belum sepenuhnya teralisasi menjadi pembangunan fisik yang optimal, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen dan upaya strategis untuk

mengatasi hambatan struktural, terutama di bidang pembiayaan dan infrastruktur.

Di tengah hambatan seperti keterbatasan anggaran dan kewenangan, Dinas tetap menunjukkan dukungan melalui pendekatan fasilitatif dan koordintif dengan berbagai pihak. Dukungan ini menjadi fondasi awal untuk pengembangan Wisata Pulau Pandang yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Kemudian dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos.,MAP selaku kepala camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara :

“ Kalau kami mendukung kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara. yang pada prinsipnya menyatakan sikap mendukung dan menyetujui setiap upaya pengembangan pariwisata yang diinisiasi oleh Dinas, kecamatan memfasilitasi aspek keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan pelabuhan sebagai titik utama aktivitas wisata. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengawasan dan pengendalian guna mencegah terjadinya gangguan keamanan, termasuk praktik pungutan liar (pungli), sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif bagi wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata.”

(Wawancara pada pukul 14:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dukungan pemerintah kecamatan menunjukkan adanya sinergi kelembagaan dalam pengembangan pariwisata. Aspek keamanan dan ketertiban merupakan unsur kunci untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan. Tanpa jaminan keamanan, upaya promosi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas tidak akan optimal.

Peran kecamatan dalam mengawasi dan mengendalikan potensi gangguan, termasuk praktik pungli, dapat dianggap sebagai bentuk dukungan operasional yang langsung terkait pelayanan publik. Hal ini menegaskan pembagian tugas antara Dinas sebagai perumus dan penggerak kebijakan pariwisata dengan kecamatan sebagai pelaksana pengawasan di lapangan.

Dukungan tersebut menjadi faktor penunjang dalam mengatasi hambatan non-teknis yang dapat menghambat pengembangan wisata, khususnya terkait kenyamanan dan citra destinasi. Keamanan yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan wisatawan dan pelaku usaha, sekaligus memberi dampak positif pada keberlanjutan aktivitas pariwisata

Meskipun ada berbagai hambatan anggaran, infrastruktur, dan kewenangan, dukungan dari pemerintah kecamatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi modal penting bagi pengembangan Wisata Pulau Pandang. Sinergi antara Dinas dan kecamatan perlu terus ditingkatkan agar pengembangan pariwisata di Kecamatan Tanjung Tiram lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu adrian selaku pelaku usaha travel wisata Pulau Pandang :

“Dukungan yang diberikan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara terhadap aktivitas usaha pariwisata yang dijalankan dinilai masih bersifat terbatas. Sebagai pelaku usaha hingga saat ini peran Dinas lebih banyak berupa pemberian dukungan secara umum atau support, tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pengembangan operasional wisata, dukungan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk respons positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, kemudahan dalam pengurusan perizinan, serta sikap terbuka dari pihak Dinas terhadap inisiatif yang dikembangkan oleh pelaku usaha travel. Namun demikian, belum terdapat dukungan yang bersifat teknis maupun pendampingan berkelanjutan yang secara langsung dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha pariwisata.”

(Wawancara pada pukul 16:00 wib pada hari Senin 06 Januari 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan Dinas masih berada pada ranah administratif dan normatif, belum mengarah pada penguatan kapasitas secara konkret. Kelonggaran perizinan dan sikap terbuka merupakan bentuk dukungan kelembagaan yang penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan

teknis, pelatihan, serta evaluasi program yang terstruktur.

Kondisi ini dapat menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang, khususnya untuk meningkatkan profesionalisme layanan dan daya saing destinasi. Tanpa pendampingan berkelanjutan, inovasi dan peningkatan kualitas layanan sangat bergantung pada inisiatif mandiri pelaku usaha, berisiko menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan dan kurangnya standarisasi.

Kemudahan perizinan dan respons positif Dinas tetap bisa dipandang sebagai dukungan awal yang menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha. Dukungan ini berpotensi menjadi modal dasar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penguatan pembinaan dan pengawasan yang lebih aktif.

